

**UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA BATU
DALAM HAL PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI
KOTA BATU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.
19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN**

(Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

YUDA KURNIAWAN

NIM. 0710113061



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

ABSTRAKSI

Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden RI tanggal 21 Juni 2001. Maka pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan meliputi tiga kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo) yang terdiri 19 desa serta 4 kelurahan.

Wilayah kota Batu sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan masyarakat sekitar, jika dilakukan suatu manajemen pemerintahan yang tepat di kota Batu, dipastikan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik bagi masyarakat akan menjadi ukuran dalam hal kesejahteraan. Sehingga pemekaran wilayah menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Seiring dengan perkembangan kota Batu yang semakin maju dan meningkatkan kepadatan penduduk, menyebabkan adanya ketimpangan pada kecamatannya yang hanya berjumlah tiga kecamatan yaitu kecamatan Batu, terlihat dari luas masing-masing wilayah kecamatan dan jumlah penduduk di kecamatannya. Hal inilah yang dianggap menjadi salah satu dari banyaknya penyebab kurang meratanya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Kota Batu melakukan pemekaran di tiap kecamatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi pemerintah Kota Batu melakukan pemekaran, usaha apa saja yang dilakukan pemerintah kota batu dalam melakukan pemekaran wilayah kecamatannya, dan hambatan apa saja yang ditemui dalam prosesnya. Faktor yang mendasari adalah, adanya ketimpangan di wilayah kecamatannya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu adalah, melakukan pengkajian wilayah dan survey, kemudian melakukan perencanaan pembangunan dan mempersiapkan segala sarana prasarana bagi daerah baru hasil pemekaran wilayah. Hambatan yang ditemui adalah adanya hambatan baik dari internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan yang meliputi wilayah dan kondisi dari masyarakat dan wilayahnya.

Kata Kunci : Upaya, Pemekaran Wilayah, Kota Batu

Abstract

This reaserch aim to find out and analyze the effort of Batu city Government to Expanding city area. In 2001 Batu city was made by Indonesian Government in regulation number 11. Separated from Malang region and consist of three sub area, that is Junrejo, Batu, and Bumiaji. After twelve years Batu city become prosper city and need to be expanded due to vast sub area of Batu city, and vast number of people living in the city. But, the problem is in every region, there is large number of differences. Batu city goverment try to expanding from 3 sub area, and divided to five or six area.

Reasearch carried out by sociological, juridicial methods which based its reaserch on the efforts of Batu city goverment, and the regulations, then the fact that happened on the field and the society. Data that used for the primary and secondary obtained by means of interview, observatiion, and documentation in society of Batu city.

The result of this research explain that the large differences of sub area and the peoples in every area of Batu city, then the prosperity rate become the reasons, that Batu city goverment efforts to expanding city region. Beside the reasons, this reaserch explain about obstacle that Batu city goverment find out in the procces, also this reaserch explain about Batu city goverment efforts to expanding the city region.

LATAR BELAKANG

Kota Administratif Batu dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 15.137 ha, secara geografis wilayah Kota Administratif Batu mempunyai kedudukan yang strategis, baik dari segi industri dan perdagangan serta pariwisata. Kota Administratif juga mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan di luar negeri, selain itu Kota Administratif menunjukkan perkembangan yang pesat khususnya di bidang pelaksanaan pembagian dan peningkatan jumlah penduduk yang pada tahun 1993 berjumlah 147.037 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 156.681 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,9 % per tahun.

Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya berubah menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden RI tanggal 21 Juni 2001. Maka pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan meliputi tiga kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo) yang terdiri 19 desa serta 4 kelurahan.

Wilayah dari kota Batu sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan masyarakat sekitar, secara logika semakin luasnya suatu wilayah, maka potensi sumber daya alam dan juga potensi ekonomi suatu wilayah pemerintahan akan semakin besar, sehingga jika dilakukan suatu manajemen pemerintahan yang tepat di kota Batu, dipastikan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan menjadi kota yang maju. Selain itu juga, pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat akan menjadi ukuran dalam hal kesejahteraan. Sehingga pengaturan kependudukan menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang **UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM HAL PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA BATU BERDASARKAN PP NO 19 TAHUN 2008 (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).**

A. PERMASALAHAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu.

Untuk mengetahui, mencari tahu, dan menganalisis hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu dan solusinya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan pemerintah dalam pemekaran wilayah suatu kota dan juga faktor – faktor lain di masyarakat yang ikut berpengaruh dalam hal pemekaran wilayah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini mengkaji permasalahan dari segi hukum yaitu Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang kecamatan. Selain itu juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, seberapa besar peran Bappeda Kota Batu dalam hal melakukan upaya pemekaran kecamatan di Kota Batu sesuai dengan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan di Badan perencanaan pembangunan Kota Batu, peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Batu, karena Kota Batu yang dianggap kota yang masih baru dan mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga tentunya akan banyak aktor yang melandasi pemekaran wilayah kota Batu. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Data hasil wawancara merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisa oleh peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil

penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

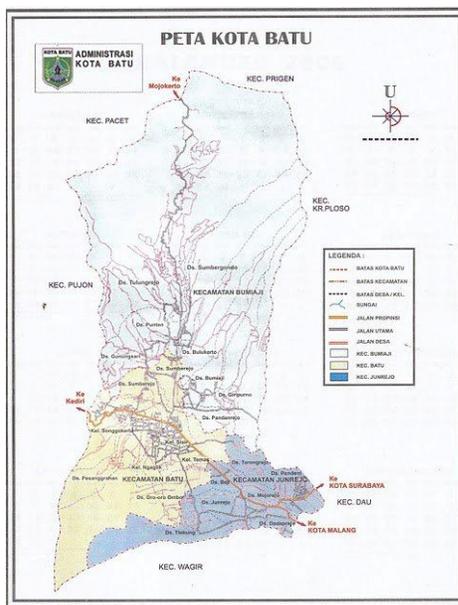
1) Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia Kota Batu dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi lebih luas, dan daerah dataran. Luas wilayah Kota Batu secara keseluruhan adalah 19 908, 72 Ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas wilayah Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Kota Batu terletak diantara $122^{\circ} 17'$ sampai dengan $122^{\circ} 57'$ bujur mpai dengan $8^{\circ} 26'$ Lintang Selatan. Kota Batu terletak dengan ketinggian \pm 800 meter diatas permukaan laut dan berada di lingkungan gunung Panderman (2.010 m) dan gunung Welirang atau Kemukus (3.1156 m).

Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, desa Tlekung dan desa Torongrejo Kecamatan Junrejo serta hampir seluruh desa di kecamatan Bumiaji merupakan areal perbukitan. Desa Bumiaji, Bulukerto, Gunungsari, Punten, Sumbergondo, Desa Giripurno berelief terjal. Sedangkan desa ataupun kelurahan lain nya relatif datar. Kondisi demikian, menjadikan Kota Batu berhawa sejuk dengan suhu udara berkisar antara 17° – 25° Celcius.

Peta Kota Batu



Secara Administratif, Kota Batu dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Batu
2. Kecamatan Junrejo
3. Kecamatan Bumiaji

Adapun batas – batas dari Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
2. Sebelah Timur : Kabupaten Malang
3. Sebelah Barat : Kabupaten Malang
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Malang

2) Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu

Pemerintah Kota Batu terbentuk semenjak Kota Batu menjadi daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu. Penyelenggaraan pemerintahan melalui otonomi daerah diantaranya berupa pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan wajib dan pilihan oleh daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu Perencanaan pembangunan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan wajib dalam perencanaan pembangunan di kota Batu, khususnya terkait dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan

pebangunan daerah, maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu.

Menindak lanjuti pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, pemerintah kota Batu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lembaga teknis daerah kota Batu maka terbentuklah struktur organisasi yang baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badanyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing – masing satuan kerja perangkat daerah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu

Upaya pemekaran tiga kecamatan di Kota Batu, yaitu kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Batu. Pemerintah Kota Batu telah berupaya untuk melakukan pemekaran wilayah yang meliputi tiga wilayah tersebut. Tujuan awal dari usaha pemekaran wilayah di Kota Batu adalah:

- a. Persebaran penduduk dari tiap – tiap kecamatan supaya merata dan juga luas dari masing – masing kecamatan yang saat ini dinilai timpang antara satu dengan yang lain.
- b. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Pujon, Kasembon, dan Ngantang dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk yang lama dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih dekat. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah secara tepat, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- c. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Batu melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dimekarkannya wilayah dari tiga kecamatan di Kota Batu tersebut, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah Bumiaji, Junrejo, dan Batu yang selama ini belum tergali.
- d. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan pembagian kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah Kota Batu.

Secara lebih rinci, pada umumnya pemekaran wilayah Kota Batu ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan keterlibatan;

Pemekaran wilayah Kota Batu yang memecah Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo, disebabkan wilayah-wilayah tersebut dinilai mengalami ketimpangan baik dari segi luas wilayah maupun dari jumlah penduduk di tiap kecamatan nya. Dapat dilihat dari segi wilayah dan jumlah penduduk, persebaran penduduk paling banyak berada di daerah pusat kota, sedangkan jika dilihat dari luas wilayah sangat tidak seimbang. Karena itu dengan adanya pemekaran dari tiga kecamatan ini diharapkan mampu membangun pusat – pusat pelayanan publik secara merata, sehingga diharapkan persebaran penduduk pun mulai bisa merata walupun tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar¹. Beberapa lokasi penduduk juga masih jauh dari pusat pemerintahan induk dan kurang mendapat perhatian. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari kantor pemerintahan kurang mendapat pelayanan pemerintahan yang seharusnya dari pemerintah induk. Hal tersebut tentunya menjadi masalah bagi masyarakat di wilayah tersebut karena mereka kesulitan setiap akan melakukan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachman selaku staff Bappeda bagian pemerintahan dan sosial budaya, pemerintah itu seharusnya bertugas memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cepat dan sebaik-baiknya. Kalau kemudian masyarakat di daerah Bumiaji dan Junrejo merasa terlau jauh dalam menjangkau kantor pemerintah, maka seharusnya ada tindak lanjut dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut². Lebih lanjut dikatakan, upaya pemekaran tersebut sangat

¹ Wawancara dengan Bapak Yayat staff Bappeda bagian data, pengembangan dan penelitian

² Wawancara dengan Bapak Rachman Staff Bappeda bagian Pemerintahan dan Sosial Budaya

bergantung pada kerja sama masyarakat setempat. Kalau memang masyarakat mampu bekerja sama, maka prosesnya akan cepat.

Dijelaskan, lebih lanjut, Bapak Rachman mengatakan bahwa pemerintah Kota Batu menyadari sepenuhnya kalau masyarakat di Kota Batu, khususnya kecamatan Bumiaji dan Junrejo, masih banyak penduduknya yang merasa jauh dari pusat kota dan pemerintahan. Hal ini akibat dari luasnya kecamatan di Kota Batu yang tidak merata, dan juga persebaran penduduknya yang lebih banyak terpusat di tengah Kota Batu. Sehingga, sedikit banyak menimbulkan kesulitan pada warga untuk melakukan berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan pemerintahan maupun yang berhubungan dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam memperoleh pelayanan kesehatan, masyarakat di dua kecamatan dan Junrejo juga mengaku kesulitan ditambah jarak yang cukup jauh untuk berobat di sejumlah Rumah Sakit di Kota Batu. Intinya mereka merasakan banyak kesulitan dalam menjangkau sarana publik dan mendapat pelayanan umum di Kota Batu³.

Pemekaran tiga kecamatan tersebut selain akan mendekatkan pelayanan masyarakat, pembangunan kawasan tersebut akan lebih terintegrasi. Dalam pembangunan pariwisata misalnya, seluruh objek pariwisata di tiga kecamatan tersebut akan lebih berkembang sejalan dengan pesatnya pengembangan wisata di Kota Batu.

Oleh karena itulah pemekaran wilayah ini dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, dimana nantinya diharapkan dengan adanya pemekaran wilayah ini dapat muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatnya berbagai potensi yang selama ini belum diolah secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses

³Wawancara dengan Bapak Rachman Staff Bappeda bagian Pemerintahan dan Sosial Budaya

pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan lain sebagainya.

3.Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Hal Pemekaran Wilayah Kota Batu

Akibat dari jumlah persebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo yang tidak seimbang sehingga menyebabkan beberapa wilayah yang letaknya jauh dari pusat kota dan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk
Batu	45,46	98.497
Junrejo	25,65	50.732
Bumiaji	127,98	59.137
Kota Batu	199,087	208.366

(Sumber data sekunder, 2012 Batu City in figures)

Sejumlah pelayanan publik pun memang belum tersedia secara memadai di sejumlah pelosok daerah yang wilayahnya jauh dari pusat kota dan pemerintahan. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sulitnya masyarakat memperoleh pelayanan publik secara maksimal. Sehingga dari sini dirumuskan jalan keluar agar persebaran penduduk bisa merata, luas dari tiap kecamatan menjadi berimbang dan perkembangan dari daerah semakin cepat⁴. Dalam melakukan persiapan pemekaran daerah, tentunya Bappeda merujuk pada peraturan tentang kecamatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Dimana disana telah disebutkan secara jelas mulai pasal 2 sampai dengan pasal 11 yang mengatur tentang pembentukan daerah kecamatan yang baru.

Langkah awal yang dilakukan oleh Bappeda adalah melakukan persiapan dari rencana pemekaran dengan cara melakukan penjarangan

⁴ Wawancara dengan Bapak Yayat staff Bappeda bagian data, penelitian dan pengembangan

aspirasi masyarakat. Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan proses pemekaran wilayah ini. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat⁵.

Dalam kaitan dengan hal ini, lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang kelebihan dan kelemahan pemekaran wilayah maupun pentingnya pelaksanaan referendum. Dengan demikian, dalam tahap awal atau masa persiapan, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Terdapat berbagai metode penjaringan aspirasi seperti melalui questioner, seminar atau lokakarya, namun dalam hal pemekaran wilayah, referendum merupakan pendekatan yang paling tepat.

Pendekatan yang digunakan pemerintah Kota Batu adalah menggunakan metode referendum dalam menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Pemerintah Kota Batu menuangkan aspirasi dan pendapat masyarakat di daerah Kecamatan Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo untuk menentukan perlu atau tidaknya melakukan pemekaran wilayah, dimana dalam hal ini pemekaran wilayah yang dilakukan adalah pemecahan wilayah kecamatan-kecamatan tersebut menjadi dua bagian untuk lebih memudahkan di dalam hal pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu setelah mengetahui dan menyetujui aspirasi masyarakat di daerah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji, adalah melakukan pembentukan tim teknis. Tim teknis ini merupakan tim yang dibentuk oleh kepala daerah Kota Batu untuk mengkaji dan menilai kelayakan daerah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor teknis dan fisik⁶.

⁵ Wawancara dengan Bapak Yayat staff Bappeda bagian data, penelitian dan pengembangan

⁶ Wawancara dengan Bapak Yayat staff Bappeda bagian data, penelitian dan pengembangan

Setelah dibentuk tim teknis, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu adalah melakukan pengkajian wilayah dan survey di daerah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji yang diproyeksikan untuk dilakukan pemecahan tersebut. Dari sana kemudian diperoleh gambaran tentang rancang bangun mengenai akan dikembangkan seperti apa nantinya daerah yang sudah dipecah.

4.Hambatan Yang Ditemui Pemerintah Kota Batu dalam Pemekaran Wilayah

Terdapat beberapa faktor penghambat pemekaran wilayah di Kota Batu, antara lain:

Faktor Internal

a. Masih kentalnya budaya paternalisme

Budaya paternalisme merupakan sikap yang terlalu berorientasi keatas, akibatnya para pegawai bawahan lebih menyenangi bekerja menunggu perintah dari atasan. Seperti misalnya pada saat pengkajian wilayah Kecamatan Bumiaji, dimana banyak sekali hal yang perlu dikaji dalam tujuannya untuk mengetahui kelayakan Kecamatan Bumiaji dalam pemekaran wilayah. Mulai dari luas daerah, jumlah penduduk, potensi sumber daya, ekonomi, sosial budaya, dll. Dengan banyaknya hal yang perlu dikaji secara mendalam, seharusnya para pegawai yang terlibat dalam proses pengkajian tersebut harus mampu bertindak secara aktif, serta mampu untuk berpikir kreatif dan mempunyai berbagai macam inisiatif dalam memperoleh data-data yang relevan dan informasi yang dibutuhkan⁷. Dimana setelah itu nantinya data dan informasi tersebut akan dianalisis lebih lanjut. Sehingga dengan begitu, proses pengkajian atau analisis kelayakan wilayah dapat segera terselesaikan. Tetapi pada kenyataannya dalam proses pengkajian wilayah tersebut, para pegawai yang terlibat masih cenderung hanya mengikuti perintah atasan untuk melakukan hal-hal yang telah direncanakan. Sedangkan para atasan cenderung tidak terlibat langsung dalam proses pengkajian di wilayah yang bersangkutan dan hanya menerima hasil laporan dari para pegawai bawahannya tersebut.

⁷ Wawancara dengan Bapak Rachman staff Bappeda bagian pemerintahan, sosial dan budaya

b. Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang

Koordinasi yang kurang di lingkungan pemerintah Kota Batu diantara pegawai atau pelaku pemekaran wilayah tentu merupakan suatu hal yang menghambat. Dan hal itu masih sering ditemukan dalam pelaksanaan proses pemekaran wilayah di Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji ini. Dimana koordinasi antar anggota dalam tim teknis pengkajian wilayah masih kurang, sehingga terkadang terdapat data ganda serta terdapat data-data yang kurang relevan satu sama lain. Koordinasi yang terjadi antara bagian perencanaan dan pengkajian wilayah terkadang juga masih kurang, sehingga terdapat beberapa hal yang dikaji yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan hal tersebut menyebabkan pengkajian ulang yang membuang waktu dan biaya. Serta memperlama proses pemekaran wilayah Kota Batu ini⁸.

c. Belum tersedianya data yang akurat

Belum tersedianya data yang diperlukan dalam rangka pemekaran wilayah yang tersusun secara sistematis dan akurat, menimbulkan kendala dalam perencanaan pemekaran wilayah yang komprehensif dan berkelanjutan. Data yang diterima dari hasil kajian oleh tim teknis yang melakukan penelitian dan analisis secara langsung di wilayah yang akan dimekarkan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji, cenderung masih belum sistematis dan kurang akurat. Kurang akuratnya disebabkan oleh berbagai hal mulai dari keadaan cuaca, keadaan para pegawai yang bersangkutan, keadaan masyarakat pada wilayah yang dikaji, waktu yang terbatas, serta kurang telitinya pihak pengkaji. Data yang diterima pun terkadang diterima dalam keadaan tidak sistematis, sehingga masih perlu dilakukan pengaturan ulang data sehingga dapat sistematis serta perlu diuji keakuratan data tersebut. Jika data yang diterima tidak akurat, maka tim teknis yang melakukan pengkajian wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji ini harus mengkaji ulang sampai didapatkan data yang akurat⁹.

⁸ Wawancara dengan Bapak Rachman staff Bappeda bagian pemerintahan, sosial dan budaya

⁹ Wawancara dengan Bapak Yayat staff Bappeda bagian data, penelitian, dan pengembangan

d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring

Monitoring atau pengawasan terhadap proses pemekaran wilayah Kota Batu ini adalah hal yang sangat penting dilakukan. Tanpa pengawasan yang baik dan tepat dari pihak yang memang bertugas untuk mengawasi pemekaran wilayah ini, proses pemekaran wilayah tidak akan dapat terealisasikan. Tetapi pada pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Batu ini, masih kurang optimal pengawasan yang dilakukan. Sehingga banyak sekali rencana-rencana yang telah dibuat, kurang sesuai atau tidak tepat sasaran. Dan dalam pelaksanaannya, banyak program kerja yang tidak selesai tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan¹⁰. Sehingga hal ini makin menghambat proses pemekaran wilayah Kota Batu.

Faktor Eksternal

a. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi merupakan salah satu penyebab terhambatnya pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan internasional ini sedikit banyak berpengaruh dalam proses pemekaran wilayah di Kota Batu, seperti dalam hal arus pandangan demokrasi, perdagangan bebas, dan perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat menghambat pemekaran wilayah karena dengan adanya perdagangan bebas, maka usaha kecil menengah dan potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji bisa semakin terancam. Seperti misalnya produk apel yang mereka hasilkan, akan bisa semakin terancam oleh kedatangan produk-produk apel impor dari luar negeri. Begitu juga produk-produk olahan dari perkebunan di daerah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji yang banyak dihasilkan. Padahal jika ingin melakukan pemekaran wilayah, maka Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji harus memiliki keadaan ekonomi yang memenuhi syarat¹¹.

b. Perubahan peraturan perundang – undangan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rachman staff Bappeda bagian pemerintahan, sosial dan budaya

¹¹ Wawancara dengan Bapak Yayat staff Bappeda bagian data, penelitian dan pengembangan

Penyusunan rencana pemekaran wilayah, tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan – peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan /acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang – undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pemekaran wilayah di Kota Batu.

c. Jumlah penduduk yang terus bertambah

Jumlah penduduk yang terus bertambah ini merupakan masalah lain yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batu. Dimana pemerintah harus mampu untuk bertindak cepat dan memikirkan langkah yang dilakukan agar pemekaran wilayah ini dapat segera terwujud. Meningkatnya jumlah penduduk ini, memang sebagai faktor pendorong utama terjadinya pemekaran wilayah, namun juga menjadi faktor penghambat karena salah satu dampak meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam. Dan jika mutu lingkungan dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji semakin menurun, proses pemekaran wilayah menjadi terhambat. Kecamatan Batu dengan jumlah penduduk yang paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya, memiliki hambatan paling besar dari segi jumlah penduduk pada pemekaran wilayah ini. Dimana jumlah penduduk di Kecamatan Batu mencapai 50% dari jumlah penduduk di Kota Batu secara keseluruhan. Ditambah dengan fenomena bencana alam yang terjadi berturut – turut dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan kondisi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji menjadi perlu untuk diperbaiki terlebih dahulu untuk dapat dilakukan pemekaran wilayah secara utuh dan tepat sasaran.

Selain karena hambatan-hambatan tersebut di atas, pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Kota Batu ini harus ditunda karena adanya kebijakan moratorium dalam hal pemekaran wilayah kecamatan dan desa/kelurahan sampai pilpres 2014. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Padahal Kota Batu sudah melakukan langkah – langkah awal dari proses pemekaran kecamatan dan

kelurahan. Dijelaskan kebijakan moratorium tersebut dasarnya adalah agar tidak terjadi pembengkakan jumlah pejabat eselon. Dengan bertambahnya jumlah kecamatan di Kota Batu, maka akan ada penambahan seorang pejabat eselon III dan beberapa pejabat eselon IV¹².

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dilakukan, tentang upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu dari segi pengaturan kependudukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu adalah didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat. Kemudian faktor ekonomi, sosial dan budaya, organisasi dan manajemen, pelayanan publik dan kependudukan, pertahanan dan keamanan, serta faktor tata pemerintahan. Dengan faktor – faktor tersebut diharapkan agar daerah yang baru dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota batu dalam hal pemekaran wilayah adalah dengan melakukan persiapan dari rencana pemekaran dengan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan proses pemekaran wilayah ini. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Pemerintah Kota Batu membentuk Tim teknis yang bertugas untuk meneliti dan mengkaji layak atau tidaknya kecamatan Bumiaji, kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Batu

¹²Wawancara dengan Bapak Rahman staff Bappeda Bagian Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

3. Hambatan yang dialami oleh pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah terdapat beberapa faktor. Faktor internal dari pemerintah Kota Batu sendiri adalah:

1. Masih adanya budaya paternalism yaitu menunggu perintah dari atasan, sehingga pegawai – pegawai di lingkunagn pemerintahan Kota Batu kurang memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaan yang sudah diberikan. Dalam hal ini melakukan pengkajian terhadap daerah yang siap dimekarkan.
2. Kurangnya koordinasi antar internal pegawai yang melakukan tugas lapangan, sehingga didapati adanya kesalahan dalam melakukan survey dan pengkajian
3. Lemahnya monitoring terhadap program – program kerja yang telah dibuat, sehingga jika ada sedikit kesalahan dimana tidak sesuai dengan rancangan awal, maka akan menghambat proses pemekaran.
4. Belum adanya data yang akurat. Hal ini disebabkan akibat dari banyaknya kendala baik dari internal pemerintahan yaitu kondisi dari pegawai pemerintah Kota Batu sendiri, selain itu faktor cuaca dari daerah yang diteliti terkadang mempengaruhi perolehan data, banyak hal mempengaruhi keakuratan data yang diperoleh.

Adapun faktor eksternal yang juga mempengaruhi proses pemekaran tiga kecamatan di Kota Batu adalah:

1. Pengaruh globalisasi, dimana hal ini dianggap berpengaruh karena cepatnya perubahan pada teknologi informatika seperti Internet maupun perangkat lain terkadang memudahkan berbagai informasi untuk masuk kedalam masyarakat. Hal tersebut dapat menghambat pemekaran wilayah karena dengan adanya perdagangan bebas, maka usaha kecil menengah dan potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji bisa semakin terancam.

2. Banyaknya perubahan peraturan perundangan. Dengan berubahnya landasan /acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang – undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pemekaran wilayah di Kota Batu.
3. Jumlah penduduk yang terus bertambah. Hal ini merupakan masalah lain yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batu. Meningkatnya jumlah penduduk memang merupakan faktor pendorong utama terjadinya pemekaran wilayah, namun juga menjadi faktor penghambat karena salah satu dampak meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam. Dan jika mutu lingkungan dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji semakin menurun, proses pemekaran wilayah menjadi terhambat.

B. Saran

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Batu dan meningkatkan eksistensi Pemerintah Kota Batu, maka disini penulis mengemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah Kota Batu dan instansi pelaksana lebih peka terhadap masalah – masalah yang ada pada tiap kecamatan, sehingga apabila mayoritas masalah yang dianggap penting dalam hal pemekaran dapat diatasi, maka otomatis pemekaran wilayah di tiap kecamatan tidak akan banyak mendapat hambatan.
2. Pemerintah Kota batu dan dinas terkait supaya terus melakukan evaluasi kinerja pegawai, tidak hanya itu deskripsi tugas dari tiap komponen pegawai juga dijelaskan secara rinci sehingga tidak ada miss komunikasi dari komponen pegawai. Jika masing – masing pegawai memahami tugasnya maka tidak akan ditemukan kesulitan sepele yang terkadang memang bisa menjadi penghambat pemekaran wilayah.

Daftar Pustaka

Referensi Buku

Kota Batu Dalam Angka / Batu in Figures 2012

Tim Dosen FHUB, *Buku Pedoman Penulisan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Referensi Undang-Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Batu

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 1993

Peraturan pemerintah No 78 Tahun 2007

Referensi Internet

<http://www.slideshare.net/brendytha/perkembangan-pemekaran-daerah>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kota>

<http://www.penataanruang.net/taru/nspm/5/Bab1.pdf>

<http://dendisetiawan.wordpress.com/2008/07/08/evaluasi-pemekaran-daerah-di-indonesia-by-dendi-setiawan-mahasiswa-administrasi-negara-fisip-universitas-andalas/>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2116227-macam-macam-kebijakan-kependudukan/>